

**PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DALAM KERANGKA
SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN
UNSUR-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA**

KEMBAR WAHYU SUSILO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan pemberantasan peredaran narkotika tidak dapat berjalan maksimal sedangkan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas. Penelitian ini pun untuk mengetahui bentuk-bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia dan kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana/*penal policy*) dan teori negara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan adanya dualisme dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena adanya dualism antara Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masing-masing Penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan narkotika adalah koordinasi yang erat antar pimpinan BNN dan POLRI sebagaimana telah diatur secara tegas pada Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia adalah kewenangan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik BNN berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika.

**ERADICATION OF CIRCULAR CIRCULATION IN THE SYNERGITY
FRAMEWORK OF THE NARCOTIC NATIONAL AGENCY WITH
ELEMENTS OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

KEMBAR WAHYU SUSILO

ABSTRACT

This research was conducted to find out the reasons for the eradication of narcotics circulation that cannot run optimally while the criminal regulation in Law Number 35 of 2009 has been clearly and explicitly determined. This research is also to find out the forms of synergy between the National Narcotics Agency and the sub criminal justice system in an effort to eradicate drug trafficking in Indonesia and the obstacles in implementing synergy or cooperation in combating narcotics circulation.

The theory used in this research is the theory of criminal law policy (criminal law politics / reasoning policy) and legal state theory.

The research method used in this thesis is analytical descriptive research, by describing the applicable laws and regulations and is associated with legal theories in the practice of implementation.

The results of this study conclude that efforts to eradicate narcotics circulation in Indonesia cannot work well even though the criminal provisions have been explicitly regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics due to dualism in the resolution of Narcotics and Narcotics Precursors due to dualism between Acting Investigators Narcotics Criminal and Narcotics Precursors are authorized to disclose the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors where each Investigator feels entitled to carry out an investigation which is not impossible to ultimately harm or hinder the process of eradicating the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors. The form of synergy between the National Narcotics Agency and the criminal justice sub-system in an effort to combat narcotics is close coordination between BNN and POLRI leaders as explicitly regulated in Article 41 paragraph (2) of the Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. Constraints faced in the application of synergy or cooperation in combating narcotics circulation in Indonesia are the arrest authority of people suspected of misuse and dark apprehension of Narcotics and Narcotics Precursor BNN Investigators based on Article 76 of the Narcotics Act.